# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.401, 2023 KEMENHUB. Unit Penyelenggara Pelabuhan. Orta. Pencabutan.


PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 17 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang belum diusahakan secara komersial, serta pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

b. bahwa penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/282/M.KT.01/2023 tanggal 27 Februari 2023 hal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan;

c. bahwa organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan;

Mengingat :

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

www.peraturan.go.id

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN.

## BAB I
## KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

### Pasal 1

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perhubungan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(2) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dipimpin oleh seorang Kepala.

### Pasal 2

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal.

### Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;

www.peraturan.go.id

b. penyediaan dan pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran;
c. penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan;
d. penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan;
e. pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan;
f. penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan;
g. penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
h. pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan;
i. penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran;
j. pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal; dan
k. pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, hukum dan hubungan masyarakat.

Pasal 4

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas, terdiri atas:
a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I;
b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II; dan
c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

Pasal 5

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
    a. Subbagian Tata Usaha;
    b. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa;
    c. Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban;
    d. Seksi Kesyahbandaran; dan
    e. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Struktur organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, kepegawaian dan umum, hukum dan hubungan masyarakat serta evaluasi dan pelaporan.
(2) Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Laut dan Pelayanan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyediaan dan

www.peraturan.go.id

pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran, dan sarana bantu navigasi pelayaran, penjaminan kelancaran arus barang, penumpang dan hewan, penyediaan dan/atau pelayanan jasa kepelabuhanan dan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan usaha jasa terkait dengan kepelabuhanan dan angkutan di perairan.

(3) Seksi Fasilitas Pelabuhan dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan, penyediaan fasilitas pelabuhan dan jasa pemanduan dan penundaan, penjaminan keamanan dan ketertiban di pelabuhan dan pemeliharaan kelestarian lingkungan di pelabuhan.

(4) Seksi Kesyahbandaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta pemeriksaan, pengujian dan sertifikasi kelaiklautan kapal.

Bagian Kedua
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

Pasal 7

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga
Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

Pasal 8

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Struktur Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Pasal 10

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, Pasal 7 ayat (1), dan Pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
(4) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB III
WILAYAH KERJA

Pasal 11

(1) Pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dapat dibentuk wilayah kerja sesuai kebutuhan berdasarkan analisis organisasi dan beban kerja.
(2) Wilayah kerja merupakan unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan yang membawahinya.
(3) Wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan mempunyai tugas membantu Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan sebagian tugas pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, pemberian pelayanan jasa kepelabuhanan untuk pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial, pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran, serta sertifikasi kelaiklautan kapal.
(4) Pembentukan atau perubahan wilayah kerja ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut setelah mendapatkan persetujuan Menteri Perhubungan.
(5) Perubahan wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditindaklanjuti dengan melakukan perubahan Peraturan Menteri Perhubungan ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

www.peraturan.go.id

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 12

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertindak selaku Syahbandar sebagai penyelenggara fungsi koordinasi tertinggi di pelabuhan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Pasal 14

(1) Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.

Pasal 15

(1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyampaikan laporan kinerja kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 16

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menyusun analisis beban kerja, analisis jabatan, peta jabatan serta uraian tugas dan fungsi terhadap seluruh jabatan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan.

Pasal 17

Setiap unsur di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan maupun dalam hubungan antarinstansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 18

Setiap unsur di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.peraturan.go.id

Pasal 19

(1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
(2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit organisasi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB IV
JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 21

(1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
(2) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III serta Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.b.

Pasal 22

(1) Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Perhubungan.
(2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
LOKASI

Pasal 23

Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berjumlah 162 (seratus enam puluh dua) yang terdiri atas:

a. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I sebanyak 4 (empat) lokasi;
b. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) lokasi; dan
c. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III sebanyak 119 (seratus sembilan belas) lokasi.

www.peraturan.go.id

Pasal 24

Nama, lokasi, dan wilayah kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Tugas dan fungsi pengaturan yang dilakukan oleh Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan hanya terbatas pada penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan kegiatan kepelabuhanan.

Pasal 26

Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku harus mengusulkan rumusan jabatan fungsional, uraian jenis kegiatan organisasi, satuan hasil kerja, waktu capaian hasil kerja jabatan, peta jabatan, standar kompetensi jabatan, dan kelas jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Pasal 27

Perubahan organisasi dan tata kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan ditetapkan oleh Menteri Perhubungan, setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Pasal 28

Pengisian sumber daya manusia pada Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini mulai berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, seluruh jabatan struktural dan fungsional yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor

www.peraturan.go.id

Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 943), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 72 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 62 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 943), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2023

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Mei 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

www.peraturan.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 17 TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR
UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN

A. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS I

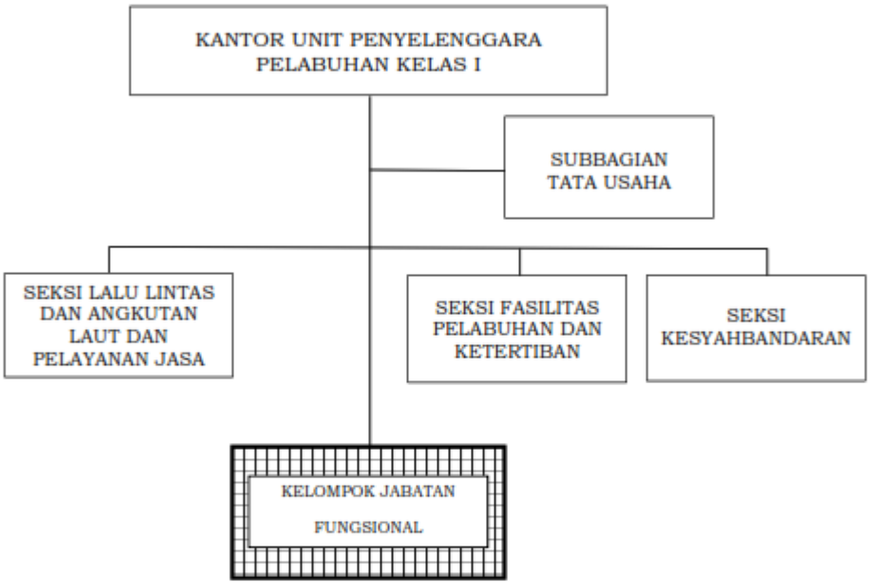


www.peraturan.go.id

B. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS II

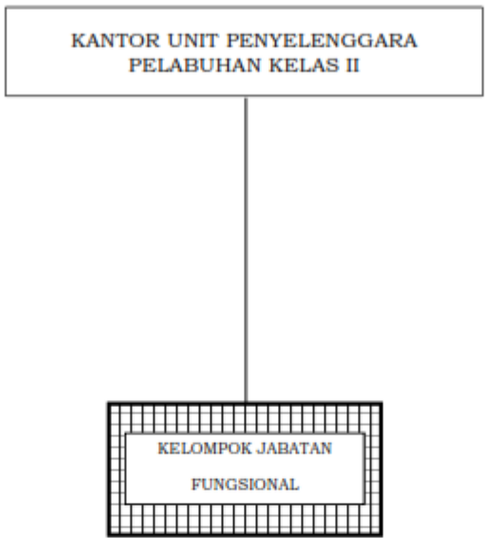


www.peraturan.go.id

C. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN KELAS III

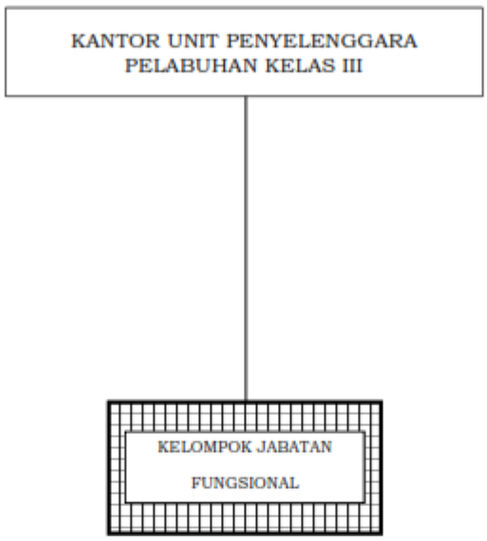


www.peraturan.go.id

D. DAFTAR NAMA KANTOR UNIT PENYELENGGARA PELABUHAN, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA

1. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tanjung Uban | Bintan, Kepulauan Riau | 1) Lagoi<br>2) Lobam<br>3) Teluk Bintan<br>4) Tanjung Berakit |
| 2. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Sangkulirang | Kutai Timur, Kalimantan Timur | Maloy |
| 3. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Molawe | Konawe Utara, Sulawesi Tenggara | 1) Lameruru<br>2) Morombo<br>3) Morosi |
| 4. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Tobelo | Halmahera Utara, Maluku Utara | 1) Galela<br>2) Kao<br>3) Dama<br>4) Darume<br>5) Kupa-Kupa<br>6) Ngajam<br>7) Gorua<br>8) Daru |

2. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Beringin | Serdang Begadai, Sumatera Utara | 1) Sialang Buah<br>2) Pantai Cermin<br>3) Pantai Labu<br>4) Rantau Panjang<br>5) Percut |
| 2. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Linau Bintuhan | Kaur, Bengkulu | - |
| 3. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tarempa | Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau | 1) Ranai Natuna<br>2) Serasan<br>3) Sedanau<br>4) Midai<br>5) Letung |
| 4. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Jepara | Jepara, Jawa Tengah | 1) Bangsri<br>2) Kelet<br>3) Kedung<br>4) Wedung<br>5) Morodemak<br>6) Kartini |
| 5. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Branta | Pamekasan, Jawa Timur | 1) Taddan<br>2) Kamal<br>3) Glimandangin<br>4) Tanlok |
| 6. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Gilimanuk | Jembrana, Bali | 1) Labuan Lalang<br>2) Pengambengan |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 7. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nusa Penida | Klungkung, Bali | 1) Buyuk<br>2) Mentigi<br>3) Nusa Lembongan<br>4) Gunaksa<br>5) Bias Munjul<br>6) Tanjung Sanghyang<br>7) Sampalan<br>8) Kusamba |
| 8. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Benete | Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat | 1) Labuhan Alas<br>2) Labuhan Lalar<br>3) Poto Tano<br>4) Kertasari |
| 9. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pemenang | Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat | 1) Ampenan<br>2) Senggigi<br>3) Carik |
| 10. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Reo | Manggarai, Nusa Tenggara Timur | 1) Iteng<br>2) Pota<br>3) Robek<br>4) Pulau Mules<br>5) Waiwole |
| 11. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Larantuka | Flores Timur, Nusa Tenggara Timur | 1) Terong/Waiwerang<br>2) Menanga<br>3) Tobilota<br>4) Waiwadan<br>5) Waiwuring<br>6) Waidoko<br>7) Waiklibang<br>8) Lato<br>9) Pamakayo<br>10) Lamakera<br>11) Sagu |
| 12. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sangatta | Kutai Timur, Kalimantan Timur | 1) Teluk Lombok<br>2) Tanjung Bara<br>3) Muara Sungai Bengalon<br>4) Lubuk Tutung<br>5) Pinggiran Senyiur Kutim |
| 13. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tana Paser | Paser, Kalimantan Timur | 1) Teluk Apar<br>2) Teluk Adang |
| 14. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Redeb | Berau, Kalimantan Timur | Tanjung Batu |
| 15. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Selor | Bulungan, Kalimantan Utara | 1) Sekatak<br>2) Batu Pahat |
| 16. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Amurang | Minahasa Selatan, Sulawesi Utara | 1) Belang<br>2) Ratatotok<br>3) Bentenan |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 17. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna | Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara | 1) Kawaluso<br>2) Marore<br>3) Kawio<br>4) Matutuang<br>5) Lipang<br>6) Bukide<br>7) Petta<br>8) Tamako<br>9) Kahakitang<br>10) Kalama<br>11) Para<br>12) Ngalipaeng |
| 18. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Luwuk | Banggai, Sulawesi Tengah | 1) Tangkiang<br>2) Rata<br>3) Balantak<br>4) Leme-Leme<br>5) Lumbi-lumbia<br>6) Sabang<br>7) Kambani<br>8) Pangkalasiang<br>9) Lalengan<br>10) Peling<br>11) Salakan<br>12) Komba-Komba |
| 19. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Banggai | Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah | 1) Mbuang-Mbuang<br>2) Ngasuang<br>3) Mansalean<br>4) Bungin<br>5) Toropot<br>6) Bolonan<br>7) Sonit<br>8) Timpaus<br>9) Lantibung |
| 20. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bajoe | Bone, Sulawesi Selatan | 1) Barebbo<br>2) Waetuo Panyula<br>3) Lamuru Kung<br>4) Uloe |
| 21. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bulukumba | Bulukumba, Sulawesi Selatan | 1) Tanah Beru<br>2) Bira<br>3) Kajang |
| 22. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Maccini Baji | Pangkajene Kepulauan, Sulawesi Selatan | 1) Biringkasi<br>2) Balang Lompo<br>3) Balobaloang<br>4) Kalukalukuang<br>5) Sabutung<br>6) Sailus<br>7) Sapuka<br>8) Pamantauang<br>9) Dewakang Lompo<br>10) Doangdoangang<br>11) Caddi<br>12) Kapoposang Bali<br>13) Langkoitang |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 23. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Palopo | Palopo, Sulawesi Selatan | 1) Belopa<br>2) Larompong<br>3) Cappasolo |
| 24. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raha | Muna, Sulawesi Tenggara | 1) Labuhan Belanda<br>2) Tondasi<br>3) Tampo<br>4) Maligano<br>5) Ereke<br>6) Lelamo<br>7) Buranga<br>8) Pure |
| 25. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Wanci | Wakotobi, Sulawesi Tenggara | 1) Kalidupa<br>2) Tomia<br>3) Binongko |
| 26. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tanjung Silopo | Polewali Mandar, Sulawesi Barat | 1) Polewali<br>2) Kayuangin<br>3) Langnga<br>4) Campalagian<br>5) Ujung Lero |
| 27. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Saumlaki | Maluku Tenggara Barat, Maluku | 1) Adault<br>2) Dawer-dawelor<br>3) Tepa<br>4) Marsela<br>5) Molu<br>6) Kroing<br>7) Tutu Kembong<br>8) Larat<br>9) Seira<br>10) Romean<br>11) Wunlah |
| 28. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tual | Tual, Maluku | 1) Elat<br>2) Banda Eli<br>3) Tayando<br>4) Kur<br>5) Watdek<br>6) Uf Mar<br>7) Kaimer |
| 29. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tulehu | Maluku Tengah, Maluku | 1) Saparua/Haria<br>2) Hitu<br>3) Nusalaut<br>4) Passo<br>5) Pelauw |
| 30. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Namlea | Buru, Maluku | 1) Air Buaya<br>2) Namlea-Ilath<br>3) Bara |
| 31. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Babang | Halmahera Selatan, Maluku Utara | 1) Loleo Jaya<br>2) Indari<br>3) Wayaua<br>4) Pigaraja<br>5) Belang-belang<br>6) Yaba<br>7) Pelita<br>8) Busua |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| | | | 9) Palamea<br>10) Bibinoi |
| 32. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Sanana | Kepulauan Sula, Maluku Utara | 1) Malbufa<br>2) Bobong<br>3) Dofa<br>4) Lede<br>5) Jorjoga<br>6) Baruakol<br>7) Poheha<br>8) Falabisahaya<br>9) Tikong<br>10) Losseng<br>11) Gela<br>12) Fuata<br>13) Waitina<br>14) Pas Ipa<br>15) Bapeno<br>16) Ohea |
| 33. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Weda | Halmehera Tengah, Maluku Utara | 1) Patani<br>2) Gebe<br>3) Yoi<br>4) Sagea<br>5) Lelilef<br>6) Maffa<br>7) Peniti<br>8) Tapaleo<br>9) Bisui |
| 34. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Soasio | Tidore Kepulauan, Maluku Utara | 1) Gita Payahe<br>2) Rum<br>3) Maidi<br>4) Loleo<br>5) Maftutu |
| 35. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Pomako | Mimika, Papua | 1) Amar<br>2) Mitro Baru<br>3) Pomako Dua<br>4) Hiripau<br>5) Kapiraya<br>6) Urumuga<br>7) Mupuruka<br>8) Kokonao<br>9) Hutta<br>10) Paraoka<br>11) Petawai Buru<br>12) Atuka<br>13) Amamapare<br>14) Otakwa<br>15) Manasari<br>16) Agimuga<br>17) Ayuka |
| 36. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Serui | Yapen, Papua | 1) Ansus<br>2) Wooi<br>3) Poom<br>4) Dawai<br>5) Randawaya |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| | | | 6) Kaipuri<br>7) Miosnum<br>8) Kadoera<br>9) Ambai<br>10) Wainapi<br>11) Sumberbaba<br>12) Teluk Ampimoi<br>13) Kabuena |
| 37. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Nabire | Nabire, Papua | 1) Kwatisore<br>2) Napan |
| 38. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Bintuni | Teluk Bintuni, Papua Barat | 1) Arandai<br>2) Babo |
| 39. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Raja Ampat | Raja Ampat, Papua Barat | 1) Kofiau<br>2) Pulau Fani<br>3) Pam<br>4) Kabare<br>5) Gag |

3. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 1. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tapak Tuan | Aceh Selatan, Aceh | - |
| 2. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Singkil | Aceh Singkil, Aceh | Pulau Banyak |
| 3. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinabang | Simeulue, Aceh | - |
| 4. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calang | Aceh Jaya, Aceh | - |
| 5. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Susoh | Aceh Barat Daya, Aceh | - |
| 6. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sirombu | Nias Barat, Sumatera Utara | Hinako |
| 7. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Dalam | Nias Selatan, Sumatera Utara | 1) Lagundri<br>2) Lahusa<br>3) Moale |
| 8. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Tello | Nias Selatan, Sumatera Utara | 1) Labuhan Hiu<br>2) Pulau Simuk<br>3) P. Tanah Masa<br>4) Sigolo-golo |
| 9. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lahewa | Nias Utara, Sumatera Utara | 1) Solonako-Afulu<br>2) Tuhemberua |
| 10. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leidong | Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara | Simandulang |
| 11. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Sarang Elang | Labuhan Batu, Sumatera Utara | 1) Labuhan Bilik<br>2) Sei Berombang<br>3) Sei Kubung |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| | | | 4) Pantai Pukat |
| 12. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Barus | Tapanuli Tengah, Sumatera Utara | 1) Sorkam<br>2) Manduamas |
| 13. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batahan | Mandailing Natal, Sumatera Utara | 1) Tabuyung<br>2) Singkuang<br>3) Natal<br>4) Sikara |
| 14. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siuban | Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | Tua Pejat |
| 15. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Muara Siberut | Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 1) Pokai<br>2) Selat Bunga |
| 16. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sikakap | Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat | 1) Bakai<br>2) Pasapuat<br>3) Sinakak<br>4) Air Haji<br>5) Surantih |
| 17. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Gaung | Indragiri Hilir, Riau | 1) Sapat<br>2) Perigi Raja<br>3) Kuala Mandah<br>4) Pulau Kijang |
| 18. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Guntung | Indragiri Hilir, Riau | 1) Pulau Burung<br>2) Simpang Kiri |
| 19. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Medang | Bengkalis, Riau | Titi Akar |
| 20. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Panipahan | Rokan Hilir, Riau | Kubu |
| 21. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Mendahara | Tanjung Jabung Timur, Jambi | 1) Muara Deli<br>2) Pangkal Duri |
| 22. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Nipah Panjang | Tanjung Jabung Timur, Jambi | 1) Simbur Naik<br>2) Sungai Lokan<br>3) Lembur Luar<br>4) Pemusiran<br>5) Air Hitam Laut<br>6) Ujung Jabung |
| 23. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Lumpur | Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan | Sungai Baung |
| 24. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malakoni Enggano | Bengkulu Utara, Bengkulu | - |
| 25. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kota Agung | Tanggamus, Lampung | 1) Krui<br>2) Batu Balai<br>3) Pulau Tabuan<br>4) Kelumbayan |
| 26. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Maringgai | Lampung Timur, Lampung | 1) Way Seputih<br>2) Way Penet<br>3) Way Sekampung |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 27. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Menggala | Tulang Bawang, Lampung | 1) Sungai Burung<br>2) Teladas |
| 28. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mesuji | Mesuji, Lampung | 1) KTM SP 8<br>2) Wiralaga |
| 29. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Manggar | Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung | 1) Dendang<br>2) Pulau Buku Limau<br>3) Pulau Long<br>4) Pulau Sekunyit<br>5) Pulau Ketapang<br>6) Pulau Batu |
| 30. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sadai | Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung | 1) Toboali<br>2) Pongok |
| 31. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dabo Singkep | Lingga, Kepulauan Riau | 1) Daik Lingga<br>2) Penuba<br>3) Sungai Buluh |
| 32. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Senayang | Lingga, Kepulauan Riau | 1) Pancur<br>2) Sei Tenam<br>3) Tajur Biru<br>4) Benan<br>5) Cempa |
| 33. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Indramayu | Indramayu, Jawa Barat | 1) Sukra<br>2) Patrol<br>3) Karangsong<br>4) Balongan<br>5) Juntinyuat |
| 34. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pelabuhan Ratu | Sukabumi, Jawa Barat | 1) Cisolok<br>2) Ciwaru<br>3) Ujung Genteng<br>4) Cidaun |
| 35. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pangandaran | Pangandaran, Jawa Barat | 1) Majingklak<br>2) Parigi<br>3) Batu Karas<br>4) Cipatujah<br>5) Pameungpeuk |
| 36. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Rembang | Rembang, Jawa Tengah | Sluke |
| 37. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Juwana | Pati, Jawa Tengah | - |
| 38. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Batang | Batang, Jawa Tengah | 1) Roban<br>2) Celong<br>3) Seklayu |
| 39. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karimun Jawa | Jepara, Jawa Tengah | 1) Legon Bajak<br>2) Desa Kemujan |
| 40. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bawean | Gresik, Jawa Timur | 1) Tambak<br>2) Camar |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 41. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Telaga Biru | Bangkalan, Jawa Timur | 1) Sepulu<br>2) Poleng<br>3) Nepa<br>4) Ujung Piring<br>5) Pasean<br>6) Bukit Tua |
| 42. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapudi | Sumenep, Jawa Timur | Pulau Raas |
| 43. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sapeken | Sumenep, Jawa Timur | 1) Pagerungan<br>2) Kangean |
| 44. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Masalembu | Sumenep, Jawa Timur | 1) Keramaian<br>2) Masakambing |
| 45. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Karangantu | Serang, Banten | 1) Kronjo<br>2) Cituis<br>3) Muara Dadap |
| 46. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan | Pandeglang, Banten | 1) Muara Binuangeun<br>2) Bayah<br>3) Panimbang |
| 47. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Lombok | Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat | 1) Labuhan Haji<br>2) Tanjung Luar<br>3) Telong Elong<br>4) Padak Guar |
| 48. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sape | Bima, Nusa Tenggara Barat | 1) Waworada<br>2) Oituiwera<br>3) Lamere |
| 49. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Calabai | Dompu, Nusa Tenggara Barat | 1) Kilo<br>2) Kempo<br>3) Teluk Cempi<br>4) Satonda |
| 50. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baa | Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur | 1) Batutua<br>2) Ndao<br>3) Oelaba<br>4) Pantai Baru<br>5) Papela<br>6) Nuse<br>7) Pulau Ndana |
| 51. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waikelo | Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur | 1) Mamboro<br>2) Rua<br>3) Binanatu<br>4) Pero |
| 52. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Marapokot | Nagekeo, Nusa Tenggara Timur | 1) Aimere<br>2) Mborong<br>3) Riung<br>4) Maumbawa |
| 53. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Baranusa | Alor, Nusa Tenggara Timur | 1) Kabir<br>2) Beang<br>3) Pulau Marica<br>4) Manatang |
| 54. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Seba | Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur | 1) Biu<br>2) Raijua |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 55. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lewoleba | Lembata, Nusa Tenggara Timur | 1) Balauring<br>2) Wulandoni |
| 56. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Atapupu | Belu, Nusa Tenggara Timur | 1) Teluk Gurita<br>2) Maubesi Hasan |
| 57. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wini | Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur | Naikliu |
| 58. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Batang | Kayong Utara, Kalimantan Barat | 1) Teluk Melano<br>2) Sukadana<br>3) Tanjung Satai<br>4) Maya Karimata<br>5) Pulau Pelapis |
| 59. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kendawangan | Ketapang, Kalimantan Barat | 1) Air Hitam<br>2) Sungai Tengar |
| 60. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Paloh | Sambas, Kalimantan Barat | 1) Temajuk<br>2) Jawai<br>3) Sakura |
| 61. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Padang Tikar | Kubu Raya, Kalimantan Barat | Teluk Air |
| 62. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teluk Sigintung | Seruyan, Kalimantan Tengah | Kuala Pembuang |
| 63. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kintap | Tanah Laut, Kalimantan Selatan | 1) Jorong<br>2) Tanjung Dewa |
| 64. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kuala Samboja | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | 1) Senipah<br>2) Dondang<br>3) Muara Jawa |
| 65. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tanjung Santan | Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur | Marangkayu |
| 66. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pulau Bunyu | Bulungan, Kalimantan Utara | 1) Bunyu<br>2) Sembakung<br>3) Sei Linuah Kayan<br>4) Tanah Merah |
| 67. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sungai Nyamuk | Nunukan, Kalimantan Utara | Balansiku |
| 68. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Likupang | Minahasa Utara, Sulawesi Utara | 1) Munte<br>2) Bangka<br>3) Gangga<br>4) Talise<br>5) Montehage<br>6) Nain<br>7) Wori |
| 69. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kotabunan | Bolaang Mongondow Timur, Sulawesi Utara | 1) Molibagu<br>2) Torosik |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 70. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Labuhan Uki | Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara | 1) Pangi Domisil<br>2) Buroko |
| 71. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Melonguane | Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara | 1) Lirung<br>2) Mangaran<br>3) Beo<br>4) Essang<br>5) Ganalo<br>6) Karatung<br>7) Kakorotan<br>8) Marampit<br>9) Miangas |
| 72. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ulu Siau | Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara | 1) Pehe<br>2) Biaro<br>3) Makalehi<br>4) Sawang<br>5) Siau<br>6) Buhias<br>7) Tagulandang<br>8) Pulau Ruang |
| 73. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pagimana | Banggai, Sulawesi Tengah | 1) Toima<br>2) Pulau Waleabahi<br>3) Pulau Dondola<br>4) Bualemo |
| 74. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ogoamas | Donggala, Sulawesi Tengah | 1) Simatang<br>2) Teluk Malala<br>3) Ogotua<br>4) Sabang Donggala<br>5) Labean<br>6) Tambu |
| 75. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Parigi | Parigi Moutong, Sulawesi Tengah | 1) Moutong<br>2) Tinombo |
| 76. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolonedale | Morowali Utara, Sulawesi Tengah | 1) Kolo<br>2) Baturube<br>3) Kaleroang<br>4) Menui<br>5) Wosu |
| 77. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Leok | Buol, Sulawesi Tengah | 1) Kumaligon<br>2) Lokodidi<br>3) Paleleh |
| 78. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Ampana | Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah | 1) Wakai<br>2) Malenge<br>3) Popolii<br>4) Una-Una<br>5) Mantangisi<br>6) Pasokan<br>7) Dolong<br>8) Podi |
| 79. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bunta | Banggai, Sulawesi Tengah | Bangketa |
| 80. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Poso | Poso, Sulawesi Tengah | Tojo |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 81. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bungku | Morowali, Sulawesi Tengah | - |
| 82. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Siwa | Wajo, Sulawesi Selatan | 1) Jalang<br>2) Bone Pute<br>3) Doping |
| 83. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Malili | Luwu Timur, Sulawesi Selatan | 1) Lampia<br>2) Munte |
| 84. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Selayar | Selayar, Sulawesi Selatan | 1) Pattumbukan<br>2) Pamatata<br>3) Tambolongan |
| 85. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jampea | Selayar, Sulawesi Selatan | 1) Bonerate<br>2) Jinato<br>3) Kalaotoa<br>4) Kayuadi<br>5) Rajuni<br>6) Pulau Madu<br>7) Pulau Karumpa |
| 86. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sinjai | Sinjai, Sulawesi Selatan | 1) Burung Lohe<br>2) Tujuh-tujuh<br>3) Kambuno<br>4) Salomekko<br>5) Tongke-tongke<br>6) Cappa Ujung |
| 87. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jeneponto | Jeneponto, Sulawesi Selatan | 1) Galesong<br>2) Tanakeke<br>3) Bangkala<br>4) Bantaeng |
| 88. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pattiro Bajo | Bone, Sulawesi Selatan | - |
| 89. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Pomalaa | Kolaka, Sulawesi Tenggara | 1) Dawi-Dawi<br>2) Tanggetada<br>3) Kasipute<br>4) Boipinang<br>5) Toari |
| 90. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kolaka | Kolaka, Sulawesi Tenggara | 1) Lasusua<br>2) Malombo<br>3) Olo-Oloho<br>4) Watunohu<br>5) Wolo<br>6) Ranteangin/Wawo<br>7) Patikala/Tolala |
| 91. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Lapuko | Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara | 1) Lakara<br>2) Torobulu<br>3) Amolengo<br>4) Laonti<br>5) Langara<br>6) Munse<br>7) Sawaeya<br>8) Manui |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 92. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kwandang | Gorontalo Utara, Gorontalo | 1) Gentuma<br>2) Tanjung Sidupa |
| 93. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Tilamuta | Boalemo, Gorontalo | 1) Bumbulan<br>2) Marisa<br>3) Lemito<br>4) Bilato |
| 94. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Mamuju | Mamuju, Sulawesi Barat | 1) Pulau Ambo<br>2) Pulau Poopongan<br>3) Pulau Salisingan |
| 95. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Belang-Belang | Mamuju, Sulawesi Barat | 1) Sampaga<br>2) Budong-Budong<br>3) Kalukku<br>4) Pasangkayu<br>5) Bambaloka |
| 96. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Majene | Majene, Sulawesi Barat | 1) Pamboang<br>2) Palipi<br>3) Sendana<br>4) Malunda<br>5) Tinambung |
| 97. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Namrole | Buru Selatan, Maluku | 1) Leksula<br>2) Ambalau<br>3) Nanali<br>4) Tifu<br>5) Wamsisi<br>6) Waemulan |
| 98. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Amahai | Maluku Tengah, Maluku | 1) Tehoru<br>2) Bemo |
| 99. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wonreli | Maluku Barat Daya, Maluku | 1) Lerokis<br>2) Serwaru<br>3) Hila/Romang<br>4) Lakor<br>5) Wulur<br>6) Moa<br>7) Ilwaki<br>8) Lirang<br>9) Eray/Upisera<br>10) Mahaleta<br>11) Pulau Tamta Luang |
| 100. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bula | Maluku Tengah, Maluku | 1) Wahai<br>2) Kobisonta<br>3) Kobisadar<br>4) Besi<br>5) Pasanie |
| 101. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Dobo | Kepulauan Aru, Maluku | 1) Batu Goyang<br>2) Benjina<br>3) Warabal<br>4) Tabarfane<br>5) Kobror<br>6) Marlasi |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 102. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Geser | Seram Bagian Timur, Maluku | 1) Kesui<br>2) Kataloka/Ondor<br>3) Air Kasa/Erlan<br>4) Teor<br>5) Undur<br>6) Manawoka<br>7) Kotasiri |
| 103. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Hatu Piru | Seram Bagian Barat, Maluku | 1) Taniwel<br>2) Waisarisa<br>3) Kairatu<br>4) Wailey<br>5) Waisala<br>6) Manipa<br>7) Buano<br>8) Kelang |
| 104. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Buli | Halmahera Timur, Maluku Utara | 1) Subaim<br>2) Dorosagu<br>3) Manitingting<br>4) Bicoli<br>5) Patean<br>6) Maba Pura<br>7) Wayambe<br>8) Sile<br>9) Patlea |
| 105. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Laiwui | Halmahera Selatan, Maluku Utara | 1) Wayaloar<br>2) Kawasi<br>3) Sum-Kelo<br>4) Jojame<br>5) Jikohay<br>6) Manu/Gamunu<br>7) Pulau Tapa |
| 106. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Daruba | Pulau Morotai, Maluku Utara | 1) Bere-Bere<br>2) Wayabula/Posi-Posi<br>3) Sopi |
| 107. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Jailolo | Halmahera Barat, Maluku Utara | 1) Matui<br>2) Kedi<br>3) Bataka<br>4) Sidangoli<br>5) Dodinga |
| 108. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Saketa | Halmahera Selatan, Maluku Utara | 1) Koititi<br>2) Dolik<br>3) Samo<br>4) Pasipalele<br>5) Gane Dalam |
| 109. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sofifi | Tidore Kepulauan, Maluku Utara | 1) Batulak<br>2) Galala<br>3) Galala Oba<br>4) Guraping Oba<br>5) Kayasa<br>6) Somohode |
| 110. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Agats | Asmat, Papua | 1) Atsy<br>2) Jipawer |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| | | | 3) Kamur<br>4) Pirimapun<br>5) Sawaerma<br>6) Yamas<br>7) Yaosakor<br>8) Mumugu<br>9) Wowi<br>10) Akat<br>11) Suator<br>12) Bayun |
| 111. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Waren | Waropen, Papua | 1) Koweda/Distrik Masirei<br>2) Wapoga/Distrik Wapoga<br>3) Pulau Nao<br>4) Sungai Waren<br>5) Sungai Sanggei<br>6) Ragaiwa/Distrik Wonti |
| 112. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Bade | Mappi, Papua | 1) Kepi<br>2) Kaptel<br>3) Muting<br>4) Okaba<br>5) Bulaka<br>6) Kimaam<br>7) Cabang Tiga<br>8) Eci<br>9) Moor<br>10) Anggamburan<br>11) Mindiptanah<br>12) Getenteri<br>13) Tanah Merah<br>14) Ilwayab |
| 113. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Korido | Supiori, Papua | 1) Kameri/Numfor<br>2) Korem<br>3) Yenggarbun<br>4) Miosbipondi<br>5) Mapia |
| 114. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Sarmi | Sarmi, Papua | 1) Armopa/Mudu<br>2) Bagusa<br>3) Wakde<br>4) Yamna<br>5) Kasonaweja<br>6) Trimuris |
| 115. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Oransbari | Manokwari Selatan, Papua Barat | 1) Ransiki<br>2) Rumber Pom |
| 116. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Teminabuan | Sorong Selatan, Papua Barat | 1) Kais<br>2) Inanwatan<br>3) Konda<br>4) Misool<br>5) Segun |

www.peraturan.go.id

| NO | NAMA | LOKASI | WILAYAH KERJA |
|---|---|---|---|
| 117. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Wasior | Teluk Wondama, Papua Barat | 1) Wendesi<br>2) Pulau Yende<br>3) Kuriwamesa<br>4) Roswar<br>5) Yoop |
| 118. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kaimana | Kaimana, Papua Barat | 1) Adijaya/Pulau Adi<br>2) Lobo<br>3) Avona<br>4) Namatota<br>5) Selasi<br>6) Susunu<br>7) Nofa<br>8) Sisini<br>9) Tangaromi |
| 119. | Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas III Kokas | Fakfak, Papua Barat | 1) Bomberai<br>2) Sagan<br>3) Teluk Patipi<br>4) Tomage |

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

www.peraturan.go.id